

# NEOLIBERALISME DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Hendri Hermawan Adinugraha

## *Abstract*

*The Neoliberalism for some groups was considered superior to other economic systems, but the reality is the ideology fails to provide for the people welfare and has caused excessive economic inequality. Neoliberalism is the current and emerging economic paradigm characterized by the conventional paradigm that seeks to separate the economic activity of all religious values and the release of government intervention through free markets, privatization, and globalization. Unlike the Islamic values contained in the Qur'an and Sunnah, which has been able to become the main cornerstone of an economic system, the Islamic economic system. Islam teaches a balance between individual economic freedom with justice and the common good. Because it includes outlook and way of life as a whole as well (kāffah) as Islam has a goal of creating an economic system with the principles of justice (al-'adl) for all groups. While neoliberalism is an economic ideology that is based on capitalism, and when Neoliberalism applied in the economic system, it will caused more harm than good and benefit.*

**Keywords:** *Neoliberalism, Islam.*

## 1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya ekonomi neoliberal dapat dijelaskan sebagai sebuah filosofi ekonomi-politik yang meminimalisir dominasi intervensi negara atau menolak campur tangan pemerintah dalam perekonomian nasional. Ekonomi neoliberal menitik beratkan pada metode pasar bebas (*free trade*) yang diserahkan pada mekanisme pasar dan tidak dibatasi oleh aturan-aturan positif maupun normatif ([www.detikfinance.com](http://www.detikfinance.com)).

Institusi komplementer neoliberalisme menggunakan istilah pasar bebas dan globalisasi sebagai gaya modern untuk menutupi keburukannya. Neoliberalisme, pasar bebas, dan globalisasi adalah wujud baru penjajahan masa kini dari segi ekonomi, sosial, politik, dan budaya (neoliberalisme). Sulitnya mendapatkan transparansi statment atau informasi proses kebijakan dari lembaga-lembaga pemerintah merupakan salah satu bukti kongkret dari rupa baru neoliberalisme. Kebijakan-kebijakan yang dibuat dengan mengatas namakan globalisasi dan pasar bebas itu telah berhasil menciptakan ketimpangan sosial ekonomi, sehingga si kaya semakin menjadi kaya dan sebaliknya si miskin kian terpuruk dengan kondisi ekonominya (FSPI, 2003:1).

Tidak heran jika dewasa ini banyak kritik, protes, dan demonstrasi bermunculan dari negara-negara miskin (berkembang) yang menentang paham neoliberal, protes terbesar dunia terjadi sejak tahun 1960-an di Afrika. Saat itu 200 perusahaan (seperti, General Motor, Ford dll) di Afrika mampu menguasai seperempat aktivitas ekonomi dunia. Contoh riil penerapan neoliberalisme di Indonesia adalah maraknya pendirian pabrik perusahaan “kelas kakap” (memiliki banyak kapital) mulai dari restoran, pakaian, swalayan, perlengkapan sehari-hari, dan lain sebagainya. Ironisnya, dengan kedok sebagai perusahaan multinasional (*multinatioanal company*) produksi perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi di negara-negara miskin guna meraih profit lebih banyak dengan upah buruh seminimal mungkin, yang terkadang tidak memenuhi standard kelayakan hidup masyarakat. Sedangkan penikmat keuntungan terbesarnya ialah perusahaan-perusahaan MNC tersebut. Amerika Serikat merupakan negara yang paling banyak memiliki MNC yang menguasai perekonomian dunia. Pada dekade 60-an saja 40% total investasi asing di dunia dilakukan oleh USA's MNC's, setidaknya 60% total

produksi barang manufaktur dunia dikuasai oleh USA's MNC's, yg meliputi 4 komoditas utama: bahan kimia & obat2an, mesin2, alat2 elektronik dan alat transportasi. (Salvatore, 1997:467)

Implementasi kebijakan neoliberal di Indonesia yang begitu teroganisir saat ini, telah menimbulkan peningkatan kesenjangan pendapatan di Indonesia. Hal ini terbukti dengan masih tingginya angka kemiskinan. Pada September 2012, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 29,13 juta orang. Maluku dan Papua dinobatkan sebagai daerah dengan prosentasi penduduk miskin tertinggi yaitu sebanyak 1.626 orang setara 24,14% dari total penduduk miskin di Indonesia. Angka ini merupakan persentase kemiskinan tertinggi di Indonesia. Padahal Papua merupakan lumbung emasnya Indonesia (PT. Freeport). Pada tahun 2005, gini rasio Indonesia masih 0,33 tapi pada 2011 yang lalu, tingkat kesenjangan ekonomi di Indonesia menjadi 0,41 ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)).

Data yang dilansir Perkumpulan Prakarsa juga mengungkapkan bahwa, kekayaan 40 orang terkaya Indonesia sebesar Rp. 680 Triliun (\$ 71,3 miliar) atau setara dengan 10,33% PDB. Nilai kekayaan dari 40 ribu orang itu setara dengan kekayaan 60% penduduk atau 140 juta orang. Data lain menyebutkan, 50% kekayaan ekonomi Indonesia hanya dikuasai oleh 50 orang saja ([www.berdikarionline.com](http://www.berdikarionline.com)). Penghapusan subsidi BBM dan Listrik yang menaikkan harga juga merupakan bukti kongkret ketidakberdayaan peran pemerintah dalam stabilisasi perekonomian dalam negeri. Bensin tahun 1998 sekitar Rp. 700/liter menjadi Rp 6.000 pada tahun 2008 (kenaikannya setara 76%/tahun) ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)).

Baru-baru ini Rizal Ramli dalam acara interview dengan Media Indonesia mengungkapkan, akibat penerapan faham neolib yang kebablasan di Indonesia adalah pertama, menjamurnya supermarket (misal hypermarket, matahari, dll) di seluruh wilayah Indonesia, padahal di Amerika dan Eropa saja hal itu tidak bisa. Kedua, wujud keberpihakan pemerintah terhadap rakyat seringkali diformulasikan dalam bentuk bantuan sosial yang berbasis pada rasa belas kasihan seperti BLT yang berakibat pada kurangnya kemandirian ekonomi mereka. Ketiga, merajalelanya komersialisasi pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) yang bergelar RSBI sampai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ([www.rimanews.com](http://www.rimanews.com)).

Berdasarkan fakta dan data tersebut, ketimpangan ekonomi yang disebabkan oleh faham neolib ini perlu diantisipasi dengan cara keikutsertaan/peran pemerintah (negara) yang lebih efektif dan efisien. Efektifitas peran itu antara lain tercermin pada dorongan pemerintah terhadap pengembangan industri domestik baru, pertanian dan bisnis skala kecil. Pemerintah juga harus memastikan pengelolaan sumber daya alam berbuah kesejahteraan bagi rakyat banyak. Pandangan tersebut disampaikan Joseph E Stiglitz, pemenang Nobel Ekonomi tahun 2001. (Adinugraha, 2009:2)

Oleh karenanya, ada alternatif ekonomi yang kiranya lebih baik untuk diaplikasikan ketimbang sistem neoliberal. Sistem ekonomi alternatif ini memberikan keadilan dalam pembagian modal, sumber daya alam, harga kebutuhan pokok yang stabil dan terjangkau bagi rakyat yaitu sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam memberi otoritas kepada negara untuk melakukan intervensi pada saat tertentu. Sistem ini juga memberi negara hak untuk menguasai dan mengelola faktor produksi urgent yang diperlukan untuk hajat hidup orang banyak. Sedangkan pada sistem neoliberal, semua itu dikuasai oleh MNC yang hanya memikirkan untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya dan merampas modal dan SDA dari rakyat.

Oleh karena itu topik neoliberalisme dalam perspektif Islam sangat menarik untuk dibahas karena kata "neoliberal" sedang menjadi *trending topic* saat ini, beberapa pertanyaan yang dilontarkan biasanya: bagaimana sebetulnya ekonomi neoliberal ini?

Kenapa ekonomi neoliberal muncul di Indonesia? Bagaimana Islam memandang sistem neoliberal?

Tujuan artikel ini adalah menguraikan pengertian, asal mula, dan perkembangan neoliberalisme secara singkat serta solusi yang dapat diberikan oleh Islam. Dengan harapan, melalui pemahaman neoliberalisme dalam perspektif Islam secara arif dan *kāffah*, dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi setiap kalangan yang memerlukannya.

## 2. TELAAH PUSTAKA (*PRIOR RESERCH*)

M. Dawam Rahardjo dalam karyanya yang berjudul “Demokrasi Ekonomi dalam Alam Liberalisasi Ekonomi” menyimpulkan bahwa liberalisasi ekonomi tidak identik dengan liberalisme, walaupun perkembangannya bisa menuju ke system ekonomi liberal. Dalam menghadapi era pasar bebas, liberalisasi dimaksudkan agar pelaku-pelaku ekonomi lebih mandiri dan terdorong untuk meningkatkan daya saingnya. Untuk itu koperasi dan sector negara yang tertinggal dalam perkembangannya akhir-akhir ini disbanding sector swasta harus meningkatkan profesionalisme. Tetapi disamping itu demokrasi ekonomi yang mengandung nilai kegotong-royongan itu menawarkan prinsip kemitraan antara yang telah maju dengan yang masih tertinggal (Rahardja, 1997:257).

Pemikiran Mazhab Ordo-Liberal menjadi cikal-bakal desain “ekonomi pasar-sosial” yang kemudian melandasi pembangunan ekonomi Jerman Barat setelah Perang Dunia II. Gagasan Ordo-Liberal dipandu oleh pertanyaan konkret begini: apabila persoalan kaum liberal di abad ke-18 dan ke-19 adalah bagaimana menciptakan kebebasan ekonomi dalam tata-negara yang tidak bebas, masalah kaum liberal di paroh pertama abad ke-20 adalah bagaimana mendirikan tata-negara dalam suasana kebebasan ekonomi yang sudah ada (Lemke, 2001:196).

Dalam konteks neoliberalisme melalui jargon “globalisasi” merupakan proses pertumbuhan yang multidimensi dan multibentuk melalui keterikatan dan keterhubungan antar negara dan antar individu di seluruh dunia. Dan proses pertumbuhannya menyangkut aspek ekonomi, budaya, dan sosial politik. Dalam dimensi ekonomi, proses ini mencakup pertumbuhan angka perdagangan, pergerakan mata uang, investasi global dan produksi yang melibatkan regulasi, standarisasi, dan eksistensi kelembagaan. Tenaga kerja murah, kemudahan investasi dan transportasi, liberalisasi perdagangan, serta bebasnya aliran modal mampu memobilisir pertumbuhan ekonomi dunia secara global. (Wahyu, 2011:9)

Tujuan dari segala kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh kaum neoliberal hanyalah bermuara pada satu hal yaitu bagaimana caranya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tanpa memperhatikan koridor *halal* atau *haram*. Tidak memperdulikan akibat setelah usaha tersebut, seperti kerusakan alam dan lingkungan. Yang ada dalam benak para penganut neoliberalisme hanyalah untung dan materi. Ini adalah suatu konsekwensi logis dari tidak adanya nilai-nilai spiritual dan unsure transendental (*ruhiyah*). (Hatta, 2007:5)

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1 Definisi dan Akar Ideologi Neoliberalisme

Elizabeth Martinez dan Arnolde García mendefinisikan neoliberalisme, sebagai berikut:

*Neoliberalism is a set of economic policies that have become widespread during the last 25 years or so. Although the word is rarely heard in the United States, you can clearly see the effects of neo-liberalism here as the rich grow richer and the poor grow poorer* (www.globalexchange.org).

*Neoliberalism is a political philosophy whose advocates support economic liberalization, free trade and open markets, privatization, deregulation, and decreasing the size of the public sector while increasing the role of the private sector in modern society* (www.en.wikipedia.org).

Neoliberalisme adalah sebuah ideologi Barat yang berakibat pada kesenjangan sosial. Dasar pemikiran dan ideologinya adalah bahwa si lemah/si miskin harus dikorbankan supaya yang si kuat/si kaya bisa berkembang dengan pesat, sehingga pertumbuhan ekonomi domestik juga ikut berkembang. Menurut mereka, pada akhirnya golongan lemah atau miskin akan ikut mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut (*trickle down effect*). Ideologi ini berdasarkan filsafat individualisme dan faham hedonisme (FSPI, 2003:1).

Faham neoliberal bermula dari faham liberal, pada tahun 1776 Adam Smith mempromosikan faham liberali dalam bukunya “The Wealth of Nations”. Smith beropini bahwa kebebasan dalam produksi dan perdagangan tanpa intervensi pemerintah (*laissez faire*) merupakan cara terbaik untuk membangun ekonomi suatu Negara. Smith percaya pada doktrin *invisible hands* (tangan gaib) akan menciptakan keseimbangan dengan sendirinya atau secara otomatis. Kemudian kebebasan tersebut menimbulkan dampak domino pada kebebasan berusaha dan bersaing, sehingga para pemilik modal/capital berlomba-lomba memaksimalkan keuntungan. Pada awalnya ekonomi liberal berjalan baik di Amerika antara tahun 1800-an dan awal 1900-an, sampai timbulnya depresi besar (*great depression*) pada tahun 1930-an yang mengakibatkan terjadinya pengangguran secara masif.

John Maynard Keynes kemudian mengkritik faham liberal yang saat itu dianggap sebagai kebijakan terbaik untuk kapitalis. Keynes berpendapat bahwa untuk menjamin pertumbuhan ekonomi diperlukan lapangan kerja secara penuh (*full employment*), dan pada tahapan realisasinya diperlukan intervensi pemerintah serta bank sentral untuk menstabilkan dan mengorganisir mekanisme pasar bebas dalam rangka menciptakan lapangan kerja tersebut. Pemikirannya tersebut diamini oleh Presiden Roosevelt dan pada saat itu mampu memperbaiki kehidupan rakyat Amerika. Periode intervensi pemerintah tersebut berlangsung antara 1950-1960-an, dan berhasil memperbaiki kondisi ekonomi Amerika. Seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, serta tingkat inflasi yang terkendali. Masa keemasan tersebut berakhir pada awal tahun 1970-an setelah terjadi penumpukan modal pada segolongan kapitalis, meningkatnya pengangguran dan berbagai permasalahan yang timbul pada APBN. Dari sinilah kemudian muncul faham neoliberalisme ([www.rizqullah.niriah.com](http://www.rizqullah.niriah.com)).

Istilah neoliberal adalah istilah yang lebih dekat dengan sejarah pemikiran politik Eropa Barat (spektrum konservatif, liberal, dan sosial progresif) daripada dengan sejarah politik Amerika Serikat (spektrum konservatif dan liberal). Istilah sosialis di Eropa lebih dekat dengan kategori liberal di Amerika Serikat, dan istilah liberal di Amerika Serikat lebih dekat dengan kategori sosialis di Eropa daripada dengan istilah liberal di Eropa. Di Amerika Serikat, istilah neoliberal dalam pengertian dewasa ini lebih disebut dengan istilah “libertarian” (*The Economist*, 2004:14).

Penggerak utama dari faham neolib (neoliberalisme) adalah para ekonom dari Universitas Chicago setelah Perang Dunia II, seperti Milton Friedman, Friedrich von Hayek, Gary Becker, George Stigler. Keterkaitan awal mereka dengan para pemikir Ordo-Liberal yang juga sering diberi nama Neo-Liberal, membuat mereka kemudian disebut “penganut neo-liberal aliran Chicago”. Hayek mengunggulkan kapitalisme pasar bebas dengan menempatkan harga (*pricing*) sebagai metode optimalisasi distribusi modal, kreativitas manusia, dan tenaga kerja. Sementara Friedman berpandangan insentif individual sebagai langkah terbaik dalam memajukan ekonomi. Sedangkan liberal baru

yang dikembangkan oleh Friedman dan Hayek tidak terpisahkan dari spirit dan nilai ideologi kapitalisme yang dilandasi filsafat liberalisme klasik. Menurut Betrand Russel, inti pemikiran dasar ideologi kapitalisme ialah sekularisme dan filsafat liberalisme klasik yang didirikan oleh Adam Smith (Skousen, 2006:395). Berbeda dengan liberalisme klasik yang masih berbicara kepentingan publik, liberalisme Friedman menempatkan aktivitas transaksi ekonomi (orientasi pada materi) sebagai satu-satunya landasan interaksi antar manusia dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hubungan antar bangsa dan negara (Deliarnov, 2007:27).

### 3.2 Sejarah Neoliberalisme di Indonesia

Neoliberalisme mengacu pada filosofi ekonomi politik akhir abad ke-20, sebenarnya merupakan redefinisi dan kelanjutan dari liberalisme klasik yang dipengaruhi oleh teori perekonomian neoklasik yang mengurangi atau menolak intervensi pemerintah dalam ekonomi domestic, karena hal itu akan berakibat pada penciptaan distorsi dan peningkatan biaya ekonomi (high cost economy) yang akhirnya akan menimbulkan tindakan koruptif. Fahaman ini memfokuskan kinerjanya pada pasar bebas, perdagangan bebas, minimalisir hambatan perdagangan internasional dan investasi. Dengan tujuan agar semua negara bisa mendapatkan efek positif (keuntungan) dari peningkatan standar hidup masyarakat sebuah Negara, dan modernisasi melalui peningkatan efisiensi perdagangan dan efektivitas investasi (www.wikipedia.org).

Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat, maka saat itu pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara signifikan dimobilisir oleh Inggris melalui privatisasi seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) milik mereka. Kemudian pada akhir tahun 1980-an setelah krisis moneter di beberapa Negara Amerika Latin, neoliberalisme menemukan momentum untuk penyebarluasan agenda-agenda ekonomi mereka ke seluruh dunia. Sebagaimana dikemukakan Stiglitz, dalam rangka mengatasi krisis moneter yang dialami oleh beberapa negara Amerika Latin, mereka bekerja sama dengan Departemen Keuangan AS, Bank Dunia, dan IMF untuk meluncurkan sebuah paket kebijakan ekonomi yaitu Konsensus Washington.

Garis besar agenda pokok paket kebijakan Konsensus Washington meliputi pelaksanaan: (1) kebijakan efisiensi anggaran secara ketat, termasuk penghapusan subsidi negara dalam berbagai formulasinya, (2) liberalisasi sektor keuangan, (3) liberalisasi sektor perdagangan, dan (4) privatisasi BUMN.

Walaupun realitanya pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal telah dimulai sejak pertengahan 1980-an, akan tetapi di Indonesia neoliberal menemukan moment dan timing yang tepat ketika pertengahan tahun 1997, dimana saat itu Indonesia sedang dilanda krisis moneter yang berimbas pada melemahnya nilai rupiah secara drastis. Dengan dalih untuk menanggulangi krisis moneter di Indonesia, pemerintah secara resmi mengundang IMF, World Bank dan WTO untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Karena fungsi dari IMF dan World Bank sendiri adalah untuk menciptakan stabilisasi global dan mendanai pembangunan dunia. Sedangkan WTO merupakan lembaga internasional yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas perdagangan dan berfungsi sebagai wasit dalam perdagangan internasional.

Selanjutnya, sebagai syarat untuk mencairkan dana talangan yang disediakan IMF, pemerintah Indonesia wajib melaksanakan paket kebijakan Konsensus Washington melalui penanda-tanganan MoU Letter Of Intent (LOI), yang salah satu butir kesepakatannya adalah penghapusan subsidi untuk bahan bakar minyak, yang sekaligus memberi peluang masuknya perusahaan multinasional seperti Shell, Petronas, dan lain-lain. Sehingga harga BBM naik dan tingginya inflasi tidak terkendali. Tidak cukup sampai disitu, implementasi kebijakan privatisasi atau swastanisasi beberapa BUMN di

Indonesia juga kian banyak, diantaranya adalah Indosat, Telkom, BNI, PT. Tambang Timah, dan Aneka Tambang.

Padahal, ada beberapa kegagalan dan kejahatan dalam perjalanan lembaga-lembaga tersebut. IMF, World Bank dan WTO memiliki “aib” mereka masing-masing. Tentu saja dampak dari hal tersebut dirasakan oleh berbagai negara di penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Bahkan Indonesia kala itu disebut-sebut sebagai negara terparah akibat krisis Asia Timur tahun 1997 (Adinugraha, 2009:3).

### 3.3 Dampak Kebijakan Neoliberalisme di Indonesia

Dampak negatif yang masih dirasakan oleh rakyat Indonesia dari implementasi berbagai kebijakan neoliberalisme melalui Konsensus Washington tersebut ialah tingginya tingkat kesenjangan pendapatan di Indonesia. Adapun alasan-alasan dari statement tersebut adalah ([www.berdikarionline.com](http://www.berdikarionline.com)):

Pertama, kebijakan noliberal selalu mengagung-agungkan perdagangan bebas tanpa batas, dengan alasan demi pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Efek selanjutnya yang muncul ialah penghapusan segala bentuk tariff dan bea impor. Hal ini berdampak berantai terhadap kondisi ekonomi rakyat. Misal kemerosotan pendapatan produsen atau UMKM, kemandulan pertanian lokal, dan instabilitas industri dalam negeri. Situasi ini mendorong proses penyingkiran rakyat dari alat-alat produksi. Di sektor industri, produsen kecil tersingkir dari lapangan produksi. Di sektor pertanian, peningkatan drastis jumlah petani tak bertanah.

Kedua, pemerintah sangat ketergantungan terhadap kapital asing. Oleh karena itu, pemerintah menghalalkan segala cara untuk menarik investor asing untuk berinvestasi di dalam Negeri. Untuk menambah penanaman modal asing, pemerintah membuat kebijakan atau regulasi yang menyamakan dan memudahkan perusahaan MNC, misal pengurangan pajak untuk perusahaan tersebut. Secara otomatis kebijakan ini berakibat pada penurunan pendapatan negara dari sektor pajak. Sebagai imbasnya, pemerintah akan membuat kebijakan untuk menaikkan pajak bagi pelaku usaha di dalam negeri atau menciptakan berbagai jenis pajak yang diambil dari warga Negara Indonesia. Hal ini semakin menambah ketimpangan pendapatan. Segi positif dialami oleh perusahaan MNC yang mendapatkan keuntungan besar, sebaliknya rakyat dipaksa untuk membayar pajak sebanyak-banyaknya kepada pemerintah. Kebijakan lainnya yang memungkinkan untuk dilakukan adalah deregulasi pasar tenaga kerja dengan upah yang sangat minimum, penerapan sistem *outsourcing* dan kontrak.

Ketiga, privatisasi atau swastanisasi terhadap BUMN. Dengan alasan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan pelayanan publik. Maka BUMN banyak yang dijual kepada pihak swasta, termasuk penjualan badan-badan usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya perusahaan rumah sakit, sekolah, listrik, air, transportasi, pertambangan, dan perbankan. Pihak swasta dianggap agen tunggal yang kompetibel dalam perekonomian dan diasumsikan mampu bersaing dalam dunia global. Ketika perusahaan BUMN sudah berpindah tangan pada swasta, akan menyebabkan kenaikan biaya (*cost*) atau ongkos, dimana keuntungan atas kenaikan tersebut hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang saja (FSPI, 2003:3).

Keempat, ketergantungan terhadap utang luar negeri. Hal ini merupakan akibat dari lemahnya sektor-sektor produktif dalam negeri dan berkurangnya penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak. Sehingga pemerintah memprioritaskan cicilan pengembalian utang melalui kebijakan APBN, karena ketika utang tersebut dicicil dengan lancar dan *on time* akan menambah *trust* investor asing. Sedangkan dampaknya di dalam negeri, pemangkasan anggaran untuk belanja modal dan belanja sosial. Seperti kesehatan dan

pendidikan, serta penghapusan subsidi, misal subsidi pertanian, energi, dan lain sebagainya.

Kelima, membiarkan pasar yang berkuasa. Ini sama saja dengan membebaskan aktivitas swasta untuk masuk kepada sektor layanan publik melalui mekanisme pasar. Layanan publik, seperti kesehatan, air minum (bersih), pendidikan, penyediaan rumah, dan lain sebagainya, diserahkan kepada mekanisme pasar. Akhirnya, di mata dan fikiran rakyat layanan mendasar tersebut menjadi komoditi mewah dan merekah yang akan menanggung kenaikan harga layanan tersebut, karena masyarakat diasumsikan sebagai konsumen sejati.

### 3.4 Neoliberalisme dalam Islam

Dilihat dari konsep ideologisnya, Islam dengan memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Islam menjadikan al-Qur'an dan *sunnah* sebagai landasan dasar sistem ekonominya. Sebaliknya, landasan dasar neoliberalisme adalah sekularisme dan kapitalisme. Seperti meminimalisir intervensi pemerintah dan menafyikan keikutsertaan agama dalam sistem ekonomi. Sehingga kebijakan yang dilahirkan ekonomi neolib berorientasi pada paham hedonis yang selalu beranggapan kenikmatan adalah tujuan hidup yang paling utama dari setiap manusia. Padahal dalam Islam, kenikmatan yang abadi ialah ketika seseorang menghadap Tuhan-nya dalam keadaan ia ber-Islam dan dalam kondisi *husnul khotimah*, serta berhasil mendapat gelar "ahlul jannah".

Konsep dasar ekonomi dalam perspektif Islam adalah keyakinan mendalam bahwa alam jagat raya dan segala yang ada di dalamnya adalah ciptaan Allah SWT (*Lillahi ma fis samawati wal ardhi*), dan manusia sebagai *khalifatullah* di muka bumi ini. Manusia memiliki dua tugas utama yaitu: pertama, bertauhid kepada Allah sebagai sang *Kholiq* dan kedua, memakmurkan bumi sesuai dengan syari'at yang diperintahkan-Nya. Yang terakhir, sistem ekonomi Islami juga harus dilandasi keyakinan bahwa Muhammad adalah Nabi dan rasul utusan Allah, penyempurna akhlak manusia karena ia di dalam dirinya sudah ada *uswatun hasanah* bagi seluruh manusia.

Keyakinan-keyakinan tersebut membawa konsekuensi pada pemahaman bahwa setiap upaya dan usaha untuk menata perekonomian harus sesuai dengan ketetapan-ketetapan Sang *Kholiq* sebagaimana termaktub di dalam al-Quran. Dalam tataran praktis, upaya-upaya untuk mengelola perekonomian harus dilandaskan pada *uswah* yang telah dicontohkan oleh Rasul sebagaimana termuat dalam *sunnah*-nya.

Berdasarkan konsekuensi di atas, maka Ekonomi Islam yang sedang *booming* saat ini harus merujuk pada nilai dan norma Islam yang bersifat universal dan global. Nilai-nilai yang berlaku dimana saja, kapan saja, dan bagi siapa saja karena Islam sebagai pembawa rahmat bagi seluruh makhluk yang tidak terbang pilih. Ditegaskan dalam firman-Nya, yang artinya: *dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam* (QS. al-Anbiya: 107).

Selanjutnya, dibalik semua kelebihan sistem ekonomi neolib yang sudah dianggap gagal oleh beberapa negara, kegagalan ini dibuktikan dengan terjadinya krisis ekonomi di Amerika Serikat (2008) ditandai dengan kegagalan fungsi dari sistem pasar bebas yang menguasai pasar dan terjadinya ketimpangan sosial di beberapa negara penganutnya. Globalisasi sebagai salah satu jargon dari paham neoliberal sudah melenceng dari nilai-nilai Islam. Mekanisme pasar yang sering digadang-gadang sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi juga nyatanya telah melemahkan campur tangan pemerintah yang berlebih sehingga ketika terjadi ketimpangan pendapatan pada masyarakat pemerintah juga terkesan angkat tangan bahkan cuci tangan. Padahal Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* sangat mewajibkan adanya peran maksimal dan optimal dari para *ulil amri*, dalam konteks ekonomi yaitu pemerintah. Sesungguhnya

Islam tidak sepenuhnya melarang pelaksanaan pasar bebas, hanya saja sistemnya yang terkadang keluar dari nilai-nilai moral dan etika seperti berlaku tidak jujur, tidak adil, curang dalam bertransaksi, dan lain sebagainya.

Dalam kasus ketimpangan sosial yang terjadi di beberapa negara berkembang yang diakibatkan dari paham neolib ini, Rasulullah telah mencotohkan sewaktu didatangi umatnya yang tidak memiliki nafkah memberikannya sebuah kampak sebagai alat untuk mencari nafkah (ada konsep bantuan atau subsidi dari pemerintah). Artinya beliau mengajarkan manusia untuk bekerja keras mencari nafkah sendiri. Beliau pun bersabda bahwa “tangan diatas adalah lebih baik daripada tangan dibawah” sehingga ummatnya termotivasi untuk menjadi golongan orang yang “tangan di atas”. Dalam Islam kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap sesama makhluk tercermin melalui sabda Rasul: “tidaklah kamu Islam selama kamu membiarkan tetangga sebelahmu kelaparan”

Konsep penguasaan terhadap komoditi sarana kepentingan publik seperti air, udara, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya yang dikenal dengan istilah privatisasi (swastanisasi) telah kebablasan dalam praktik riilnya, karena hanya berorientasi pada kepentingan pemodal (kapitalis) untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dan kurang berpihak pada kemaslahatan rakyat banyak. Konsep yang dijagokan oleh neoliberal ini juga telah mengingkari intisari dari Firman Allah yang artinya: *Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan.* (QS. al-‘Imran: 109). Secara normatif (dalam Islam) dan positif dalam (UUD 1945), seyogyanya hak kepemilikan atas kebutuhan dasar hajat hidup orang banyak dikelola sepenuhnya oleh negara (*ulil amri*), dan tidak malah diperjual-belikan demi kepentingan para kapitalis.

Islam merupakan agama yang mengajarkan keseimbangan (*equilibrium*) pada semua aspek. Keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrowi, keseimbangan antara kehidupan individu dan sosial, dan lain sebagainya. Sebagaimana salah satu nasehat Luqmanul Hakim kepada anaknya yang dikisahkan Firman Allah yang artinya: “Hai anakku; ambillah harta dunia sekedar keperluanmu saja, dan nafkahkanlah yang selebihnya untuk bekal akhiratmu. Jangan engkau tendang dunia ini ke keranjang atau bakul sampah karena nanti engkau akan menjadi pengemis yang membuat beban orang lain. Sebaliknya janganlah engkau peluk dunia ini serta meneguk habis airnya karena sesungguhnya yang engkau makan dan pakai itu adalah tanah belaka. Janganlah engkau berteman dengan orang yang bersifat dua muka, kelak akan membinasakan dirimu.” (QS. Lukman: 12-19). Dengan prinsip keseimbangan tersebut, maka paham ekonomi yang idealnya diterapkan adalah paham yang dapat menjaga keseimbangan diantara berbagai kepentingan para pelaku ekonomi dan masyarakat sebagai subyek dan sekaligus obyek ekonomi (Susanto dan Malik Cahyadin’ 2008:5).

Pada hakikatnya, apapun paham ekonominya selama memenuhi kaidah “*la dharara wa la dhirara*” artinya “tidak memudaratkan diri sendiri dan tidak memudaratkan orang lain” (Zaid, 1959: 68), dan aspek maslahatnya lebih besar dari pada aspek mudharatnya maka paham itu diperbolehkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketika neoliberalisme termasuk pada kategori yang *dharar* dan aspek maslahatnya tidak lebih besar dari manfaatnya, maka paham ini jelas dilarang dalam Islam.

### 3.5 Menuju Ekonomi Islam yang Maslahat

Pada realitanya, ekonomi neoliberal telah mengalami keterpurukan, ketika mereka gagal dalam menanggulangi krisis berdasarkan ide dasar kaum neolib, yakni *laissez faire*. Walaupun demikian, institusi neolib masih banyak berdiri di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sungguh ironis, disaat paham ekonomi ini sudah mengalami kehancuran,

Indonesia masih terlena dengan fatamorgana yang dijanjikan oleh faham ini (neoliberalisme) ([www.jurnal-ekonomi.org](http://www.jurnal-ekonomi.org)).

Sekarang ini, dalam rangka menanggulangi kemiskinan akibat implementasi berlebihan dari faham neolib di Indonesia, pemerintah memberikan tiga kebijaksanaan. Pertama, kebijaksanaan tidak langsung yang diarahkan kepada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan atau sustainabilitas setiap upaya penanggulangan kemiskinan; kedua, kebijaksanaan langsung yang ditujukan pada golongan masyarakat berpenghasilan rendah; dan ketiga, kebijaksanaan khusus yang dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat miskin dan aparat yang bertanggung jawab langsung terhadap kelancaran program, sekaligus memacu dan memperluas upaya untuk menanggulangi kemiskinan (Arianto, 2011:166).

Islam sebagai ajaran yang membawa rahmat dan maslahat bagi manusia telah menawarkan solusi dengan sistem ekonominya yang jelas-jelas melarang kegiatan spekulatif (*maysir*) dan penggunaan bunga, menciptakan *win-win solution* dengan semangat kerjasama dan tolong menolong (*ta'awun*), dan menerapkan prinsip keadilan (*al-'adl*) yaitu sistem Ekonomi Islam. Ekonomi Islam tidak melarang campur tangan pemerintah terhadap pasar sepanjang hal itu dimaksudkan untuk mengatasi distorsi atau kecurangan yang terjadi sehingga mekanisme pasar yang transparan dan berkeadilan tetap terpelihara. Karena maslahat adalah sarana yang menyebabkan adanya kebaikan dan manfaat. misalnya, ekonomi Islam adalah sarana untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan ekonomi (*falāh*) (al-Sayih, 1993:25). Beberapa contoh penerapan maslahat dalam aktivitas ekonomi yaitu pembenaran Ibnu Taimiyah terhadap intervensi harga oleh pemerintah padahal Rasul tidak melakukannya, pelaksanaan impor gandum dari Mesir oleh Umar ketika terjadi kelangkaan, adanya saksi yang adil dalam transaksi ekonomi, penerapan sistem bagi hasil dalam usaha, pengharaman terhadap tindakan spekulasi, dan masih banyak contoh lainnya ([www.agustianto.niriah.com](http://www.agustianto.niriah.com)).

Dalam perspektif Islam, seluruh aktivitas ekonomi ialah positif selama keterlibatan para pelaku ekonomi dalam aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang *kāffah*. Pengertian implementasi Islam secara *kāffah* ialah (a) totalitas dalam pelaksanaan ajaran Islam, dan (b) mencakup segala aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrowi. Dengan melakukan aktivitas ekonomi secara *shahih*, berarti telah menjadikan Islam sebagai sistem kehidupan (*way of life*), bukan sekear ritual seorang hamba dengan Tuhannya. Sebab Islam sebagai *guidance of life* selalu berlandaskan kepada al-Qur'an dan as-sunnah. Oleh karena itu, sungguh ketakwaan seseorang kepada *Rabb*-nya berhubungan positif dengan peningkatan produktifitas, artinya semakin tinggi tingkat ketakwaan seseorang kepada *Rabb*-nya maka seseorang itu pun akan lebih produktif. Peningkatan produktifitas seyogyanya akan berakibat pada penambahan kekayaannya (P3EI, 2008:14-16).

Dalam perspektif Islam, kekayaan Allah (*al-mulk*) termasuk didalamnya ialah sumber daya alam (SDA) tanpa batas atau tidak terbatas hal ini yang membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Allah menciptakan alam semesta bagi manusia tidak akan habis hingga akhir masa (*yaumul qiyamah*), karena di alam semesta terdapat potensi kekayaan yang sepenuhnya belum tergali dan ditemui oleh manusia. Maka manusia atau yang biasa disebut dengan sumber daya manusia (SDM) dituntut untuk menggali dan menemukannya yang mana sumber daya alam (SDA) tanpa batas atau tidak terbatas (Sudarsono, 2002:10-11).

Pada intinya, semua aktivitas dan perilaku dalam perekonomian acuannya adalah *maslahah*. Jika di dalamnya ada kemaslahatan, maka hal itu dibenarkan dan dianjurkan oleh syari'ah. Sebaliknya jika di sana ada *dharār* dan *mafsadah*, maka prakteknya tidak

dibenarkan, seperti spekulasi saham dan valas, *dumping*, dan transaksi bisnis lainnya yang mengandung unsure *tadlis*, *maysir*, *najasy*, *gharār*, *dzulm*, *ihdikār*, dan *ribā*.

#### 4. PENUTUP

Neoliberalisme merupakan faham ekonomi yang mengagung-agungkan kebebasan kekuatan kapital dan berusaha untuk minadakan keikutsertaan (intervensi) Negara dan nilai-nilai agama dalam aktivitas perekonomian. Kebijakan faham ini seringkali dikemas dengan istilah yang menawan agar bisa menarik calon konsumennya (Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia), seperti istilah “globalisasi” dan “privatisasi”.

Ekspansi neoliberalisme sangat terlihat di Indonesia ketika Negara ini mengalami krisis moneter pada pertengahan tahun 1997. Dengan dalih untuk membantu memulihkan kondisi perekonomian Indonesia, maka IMF, World Bank dan WTO dengan percaya diri masuk ke Indonesia dengan gombalan dan rayuan mautnya. Menawarkan pinjaman dana dengan syarat-syarat tertentu. Indonesia yang kala itu sedang terhimpit dan membutuhkan dana, dengan senang hati menerima pinjaman tersebut beserta paket persyaratannya. Seiring dengan berjalannya waktu, bukannya sembuh Indonesia malah semakin sakit dan terpuruk. Kompensasi bunga dari utang-utang dengan instansi tersebut juga tidak terkejar lagi untuk dicicil, padahal sudah melakukan pengetatan APBN untuk berusaha melunasinya. Singkat cerita dapat dikatakan bahwa Indonesia telah menjadi korban penjajahan neoliberalisme.

Secara tidak langsung, ideologi ini tidak berhasil memberi kesejahteraan bagi Negara penganutnya. Bahkan, nyatanya di Negara Adi Daya sekuat Amerika neoliberalisme menunjukkan kegagalannya yang terparah pada tahun 2008, dengan dilandanya krisis global di Negara paman Syam tersebut. Karena salah satu tujuan utama dari faham ini adalah berusaha untuk mengkikis bahkan menghapus unsur-unsur kolektivisme, egliter, dan kemasyarakatan. Dari sini jelaslah sudah, bahwa neoliberalisme sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama, norma kebudayaan, dan moral/etika masyarakat Indonesia.

Karena itu tawaran konsep ekonomi Islam yang *masalah* untuk Indonesia lebih baik dan kuat dalam *frame* syari’ah menjadi sangat relevan sebagai sebuah solusi aplikatif. Pesatnya pertumbuhan usaha atau bisnis lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, koperasi syariah (BMT), *takaful*, *ar-rah*n, dan lain sebagainya merupakan indikasi positif dari kemajuan sistem ekonomi Islam. Faktanya, ketika Indonesia dilanda krisis moneter dan krisis global, Bank Muamalat Indonesia tetap berdiri kokoh, padahal bank lainnya gulung tikar dan ramai-ramai melakukan *merger*.

Oleh karena itu, Islam mengajarkan keseimbangan antara kebebasan ekonomi individu dengan keadilan dan kesejahteraan bersama agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falāh*) melalui aktualisasi *masalah*. Dalam konteks ini, kehadiran peran Negara diperlukan untuk menjamin setiap warganya mampu memenuhi kebutuhan hidup standard dan mendapatkan *falāh*. Berbeda dengan faham neolib yang menafyikan peran Negara dan keikutsertaan nilai-nilai agama dalam perekonomian. Sehingga Islam memandang neoliberalisme adalah faham ekonomi yang jika diaplikasikan akan menimbulkan lebih banyak *dharār* dan *mafsadah*-nya ketimbang maslahatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan. 2009. *Kemiskinan dan Globalisasi*. Bulletin Al-Rasikh UII. Yogyakarta.
- Akbar, Akhmad dan Susanto dan Malik Cahyadin. 2008. *Praktik Ekonomi Islami di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Perekonomian*. Jurnal Ekonomi Syariah Muamalah. Vol 5. Tahun 2008.
- al-Sayih, Ahmad Abd al-Rahim. 1993. *Risalah fi Ri'ayat al-Maslahah li al-Imam at-Tufi*. Mesir: Dar al-Misriyah li al-Bananiyah.
- Arianto, Dwi Agung Nugroho. 2011. *Peranan Al-Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi & Pendidikan. Volume 8 Nomor 2. November 2011.
- Deliarnov. 2007. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- FSPI. 2003. "Sikap dan Pandangan Dasar FSPI Terhadap Neoliberalisme". 28 Februari 2003. Jawa Timur.
- Lemke, Thomas. 2001. *The Birth of Bio-Politics. Economy and Society*, 30/2, May 2001. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2003. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahardja, M. Dawam. 1997. *Agenda Aksi Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia*. cet. 1. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Salvatore, Dominick. 1997. *Ekonomi Internasional*, Edisi Kelima/Jilid 1, alih bahasa Haris Munandar. Jakarta: Erlangga.
- Skousen, Mark. 2006. *Sang Maestro "Teori-Teori Ekonomi Modern" Sejarah Pemikiran Ekonomi*. alih bahasa Tri Wibowo Budi Santoso. cet. 2. Jakarta: Prenada.
- Sudarsono, Heri. 2002. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. cet. 1. Yogyakarta: EKONISIA.
- Wahyu, Bambang. 2011. *Globalisasi dan Tantangan Bagi Sistem Keuangan Islam: Perspektif Filsafat Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq. Vol. 2. No. 1. Maret 2011.
- [www.agustianto.niriah.com](http://www.agustianto.niriah.com)
- [www.berdikarionline.com](http://www.berdikarionline.com)
- [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- [www.detikfinance.com](http://www.detikfinance.com)
- [www.globalexchange.org](http://www.globalexchange.org)
- [www.jurnal-ekonomi.org](http://www.jurnal-ekonomi.org)
- [www.kompas.com](http://www.kompas.com)
- [www.rimanews.com](http://www.rimanews.com)
- [www.rizqullah.niriah.com](http://www.rizqullah.niriah.com)
- [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)
- Zaid, Mustafa. 1959. *Al-Maslahah fi at-Tasyri' al-Islami wa Najmuddin at-Tufi*. Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi.